

**Laut Sebagai Pusat  
Peradaban Dan Pemersatu  
Bangsa: Masalah Dan Prospeknya<sup>1</sup>**  
Susanto Zuhdi<sup>2</sup>

“Where are your monuments, your battles, martyrs? Where is your tribal memory? Sirs, in that grey vault. The sea. The sea has locked them up. The sea is history” (Derek Walcott “The Sea is History,” 1979 dikutip dari Warren 2002:xxii).

### **Pendahuluan**

Lebih dari 200 orang dari Pulau Rote gagal mengikuti Festival Sasando yang digelar di Kupang dalam awal November tahun lalu. Gelombang setinggi tiga sampai empat meter disertai badai dan arus ganas menjadi kendala delegasi Rote yang sudah siap itu batal mengikuti peristiwa budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI (Kompas, November 2009). Faktor geografi dan cuaca tampaknya merupakan kendala struktural yang harus dikenali oleh masyarakat bahari di Nusantara. Pertanyaannya adalah apakah tepat memilih waktu dalam musim tersebut untuk menyelenggarakan aktivitas di Kupang dengan melibatkan peserta dari pulau

sekitar. Dalam musim itu saja gelombang sudah tinggi apalagi memang bulan itu muncul angin besar akibat perubahan iklim sehingga mempertinggi gelombang.

Dari berita lain sebelum itu, sebuah peristiwa telah terjadi yakni tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Citra Mandala Bahari pada akhir Januari 2006. setiap akhir tahun sampai bulan-bulan pertama perairan Selat Rote dikenal bergelombang tinggi. Pada saat peristiwa itu terjadi cuaca buruk disertai badai dan arus laut yang ganas (Kompas, 4 Februari 2006). Faktor alam yang biasa terjadi seperti itu ternyata tidak diimbangi dengan armada angkutan laut yang memadai. Beberapa kali kapal penolong tidak berhasil menembus gelombang untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban dari kapal yang tenggelam itu. Ternyata kapal-kapal yang beroperasi menyeberangi Selat Rote pada umumnya sudah keropos. Sedangkan KMP Citra Mandala Bahari itu sendiri dirakit pada tahun 1982 (Kompas, *ibid*). Inikah petunjuk bangsa yang sudah meninggalkan karakter kebahariannya? Ada dua pertanyaan yang harus diajukan. Pertama, bagaimana menjadikan laut sebagai (re) orientasi bangsa Indonesia sehingga menjadi paradigma dalam membangun negeri yang manfaatnya untuk kesejahteraan bersama? Melalui kemampuan bangsa dalam menjawab pertanyaan besar itulah maka laut dapat menjadi pusat peradaban bangsa. Kedua, bagaimana bangsa Indonesia dapat memelihara kedaulatan teritorial lautnya agar tujuan membangun peradaban bahari tercapai? Kedua pertanyaan ini relevan sekali untuk diajukan mengingat

<sup>1</sup> Saduran makalah yang di sampaikan pada dialog sejarah di Ambon pada Dialog Interaktif Kesejarahan di Maluku dengan sub tema: Maritim Sebagai Faktor Pemersatu Bangsa dari Perspektif Sejarah, 5-7 Agustus 2010.

<sup>2</sup> Susanto Zuhdi adalah Guru Besar Ilmu sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia; mantan Kepala Direktorat Sejarah (2001-2004), dan Direktur Geografi Sejarah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005-2006).

semakin kuatnya kecenderungan bangsa ini “membelakangi laut”. Padahal betapa eratnya hubungan laut dengan kehidupan sulit dipungkiri.

### **Laut adalah Sejarah--Sejarah adalah Kehidupan--Kehidupan adalah Laut**

Ungkapan yang dikutip dari Warren di atas, mendahului istilah bernas tentang laut, yang pernah dikemukakan Niemejer "A Sea of Histories-a History of the Seas" (laut sejarah sejarah laut). Judul dari sebuah artikel yang ditulis sejarawan Belanda itu merupakan hasil wawancaranya dengan A.B. Lapien (Itenerario). Substansi kedua ungkapan tersebut bahwa lautan adalah kehidupan dari aktivitas manusia yang tidak kurang penting dibanding dengan di daratan. Bahkan dengan tegas, Wallcot menyebut "the Sea is History" jadi artinya "laut adalah sejarah". Dan "sejarah itu adalah kehidupan" maka "laut itu adalah kehidupan.

Di laut kita dapat saksikan dinamika suatu masyarakat atau bangsa dalam mewujudkan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Bangsa yang besar dan makmur adalah mereka yang jaya di laut dalam aktivitas pelayaran, perdagangan dan akhirnya menguasai geopolitik dunia. Bangsa seperti itu pastilah mereka yang memperlihatkan orientasi dan konsistensi perilakunya yang mengacu pada gagasan dan system nilai yang dianutnya. Amerika Serikat belum menjadi negara yang jaya di laut sampai abad ke-19, sampai sesudah terbitnya "buku yang mengubah dunia" karya Alfred Thayer Mahan "The Influence of Sea Power upon History 1660-1783"

(1890). Menurut Mahan ada enam unsur yang menentukan perkembangan suatu Negara menjadi kekuatan laut: (1) kedudukan geografi, (2) bentuk tanah dan pantainya, (3) luas wilayah, (4) jumlah penduduk, (5) karakter penduduk, dan (6) sifat pemerintahannya termasuk lembaga-lembaga nasional. Inggris ebagai Negara kepulauan tidak memiliki perbatasan darat dengan tetangganya. Inggris dan Belanda tidak memiliki tanah yang subur sehingga mencari kehidupannya di laut. Keadaan pantai memungkinkan penduduk suatu negeri turun ke laut (Lapien, "Kata Pengantar" dalam van leur dan Verhoeven, 1974).

Lebih lanjut Mahan mengemukakan adanya "pengaruh karakter nasional terhadap perkembangan kekuatan laut. Sejarah membuktikan bahwa kecenderungan suatu bangsa untuk memperhatikan usaha perdagangannya merupakan unsur utama yang mendorongnya berlayar ke laut" (Lapien, *ibid*). Dalam kaitan itu tampaklah bahwa uraian Mahan menank perhatian para pemimpin AS terutama Theodore Roosevelt yang kemudian menjadi presiden (1901-1909) dan Henry Cabot Lodge di Senat. Perwujudan kekaguman pada pemikiran Mahan itu, dituangkan pemerintah AS dalam konsep dan perwujudan ekspansi seberang lautan yang segera didukung oleh rakyatnya. Mulailah pada akhir abad ke-19, AS muncul sebagai kekuatan dunia yang didukung oleh kekuatan armada lautnya (Lapien *ibid*).

Laut merupakan sumber daya kehidupan yang sungguh luar biasa besarnya sekaligus memiliki kekhasan

tersendiri berbeda di banding dengan sumber daya di darat. Pertama, adalah karena sumber daya di darat sudah lebih dahulu dieksploitasi sedemikian rupa. Untuk sebagian besar bahkan sudah jenuh dan semakin habis. Berapa luas hutan sudah ditebangi dan sudah berapa banyaknya berbagai jenis tambang seperti batubara sudah digali. Tidak berapa lama lagi sumber seperti itu akan habis. Kedua, ciri lahan agraris harus lebih dahulu ditanami sebelum hasilnya dapat dipanen. Tidak demikian halnya dengan sumber daya di laut. Siapa yang menanam ikan di laut? Bukankah man usia 'hanya' tinggal menangkapnya saja? Tentu diperlukan teknologi yang canggih untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dengan teknologi pula sumber pertambangan lepas pantai atau di tengah laut dapat digali dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

Akan tetapi manusia bukan hanya harus mengindahkan tetapi juga memelihara kelestarian bumi tempat kehidupan manusia itu sendiri. Begitulah ketika Tuhan hendak menciptakan manusia yang turun ke bumi, lalu diingatkan para malaikat (AJ Baqarah ayat 30 al'Qur'an). Memang ketika Tuhan hendak menciptakan manusia, sebenarnya malaikat sudah mengingatkan. Manusialah yang akan merusak bumi dan saling menumpahkan darah. Padahal maksud Tuhan menurunkan manusia adalah agar menjadi "wakilNya di bumi" (khalifatul fit ardh).

Laut sebagai sarana perhubungan memberi peluang terbentuknya pola-pola transportasi dan jaringan kehidupan

sosial dan budaya. Di sana berlangsung pola pola interaksi yang melandasi pencapaian komunitas sosial dalam melahirkan berbagai bentuk dan tingkat-tingkat kemajuan. Peradaban dalam KBBI (1996) berarti "kemajuan", selain bermakna "kesopanan"; "kecerdasan" dan juga "kebudayaan". Peradaban yang dimaksud disini lebih untuk memperlihatkan kemajuan bangsa yang berkarakter bahari dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Sektor perekonomian yang dapat digali untuk mewujudkan cita-cita tersebut menjadi aspek penting dikaitkan dengan potensi lautnya.

### **Indonesia: Laut dan Masa Depannya**

Mengacu pada keenam unsur berkaitan dengan negara bahari seperti pendapat Mahan di atas, nyaris sempurna dapat dipenuhi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan terbentuknya Kementerian (d/h Departemen) Kelautan dan Perikanan semasa Presiden Abdurrahman Wahid mempertegas keinginan bangsa ini untuk memajukan sektor kelautannya.

Akan tetapi masih banyak masalah yang dihadapi. Sering kita dengar dalam pembicaraan tentang sejarah, bahwa bangsa Indonesia memiliki masa lampau yang jaya seperti terungkap dari kebesaran Sriwijaya dan Majapahit misalnya. Kejayaan kedua negara pra Indonesia itu karena menguasai laut dengan armada yang mampu mengarungi samudera dan mampu memelihara kedauatannya. Artinya keduanya berkarakter laut atau bahari. Apa makna "bahari"? Seperti

terungkap di dalam KBBI (1996); terdapat tiga makna tentang “bahari”: pertama, yang mungkin paling dikenal berarti berkaitan dengan “laut”; kedua, berarti “dahulu kala”; dan ketiga bermakna “elok sekali”. Barangkali dua arti terakhir jarang didengar. Alangkah menariknya jika ketiga arti kata “bahari” dirangkaikan dalam bentukan sebuah kalimat “kehidupan yang elok sekali dahulu kala di laut”. Persoalannya adalah jangan sampai yang “elok di laut itu” hanya pada masa lampau saja.

Laut digambarkan sebagai suatu dunia bebas dan terbuka. Pada dasarnya laut memberikan peluang yang besar sekaligus tantangan yang harus dijawab. Laut menantang manusia untuk memanfaatkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan melayarinya untuk melakukan perdagangan. Tidak semua penduduk yang hidup di suatu pulau atau kepulauan telah memanfaatkan laut untuk mendukung kehidupannya. Tidak semua masyarakat di pesisir menjadi nelayan. Atau sekalipun belayar tidak jauh dari beberapa mil saja. Gambaran tentang laut tidak selamanya menjanjikan kesejahteraan tetapi juga ada yang takut terhadap laut. Nilai budaya menentukan cara pandang masyarakat terhadap laut. Masyarakat yang memandang laut sebagai orientasi dan dengan mengamalkannya dalam perilaku dapat disebut adanya budaya laut. Di kepulauan Nusantara didapati banyak suku yang berkehidupan di laut di antaranya: Bugis Makassar, Mandar, Buton, Madura, Bajo, suku Laut. Masyarakat di Talaud Sulawesi Utara, sebagai contoh, memiliki motto kehidupan yang didasarkan pada nilai

budaya maritim yang kuat yakni *somabe kei kebage*. Motto itu berarti “gelombang adalah tantangan kehidupan”.

Perairan Indonesia terdiri dari sejumlah sistem laut. Laut sebagai sistem yang memiliki sub-sub system atau unsur-unsur yang secara geografis merupakan bagian yang tak terpisahkan. Sebagai contoh jika menyebut Jawa maka asosiasi kita lebih kepada wilayah pulau dengan kata lain daratan. Marilah sekarang memposisikan diri dari lautnya, laut Jawa. Dengan kata lain kita mau mengatakan bahwa ada daratan Jawa dan ada pula pulau Jawa. Dengan paradigma begini maka yang akan terjadi adalah laut sebagai yang utama atau yang sentral. Begitulah sebetulnya dan seharusnya bahwa archipelago tidak diartikan dengan “kepulauan”, karena istilah berasal dari “archi” artinya “utama” dan “pelagos” artinya laut. Jadi archipelago sesungguhnya berarti “laut utama”.

Laut Jawa sebagai “laut utama” memperlihatkan terjadinya proses integrasi dari bagian-bagian Kalimantan, Jawa, sebagian Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara sekaligus sistem sistem laut lainnya (Lapian, 1992). Laut Jawa merupakan zone utama yang berperan menjadi lalulintas utama perdagangan dari berbagai wilayah sekitarnya jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa dalam abad ke-15. Demikian pula dalam perkembangan abad ke-19 dan seterusnya, laut Jawa berperan mengintegrasikan perekonomian kolonial dan nasional (Singgih 2003). Penggambaran Laut Jawa demikian itu pada dasarnya adalah agar tidak terjadi pandangan keliru dalam melihat

dikotomi Jawa dan Luar Jawa (Java en Outer Java).

Kini kedaulatan teritorial taut Indonesia terus-menerus menghadapi ancaman. Indonesia menghadapi masalah batas maritim dengan sepuluh negara tetangga yang belum tuntas (Kompas, 9 Juli 2009). Pulau Dana adalah pulau ‘terdepan’<sup>3</sup> di bagian selatan NKRI. Akan tetapi jika tinjauan historis menjadi dasar argumentasi, maka sesungguhnya Pulau Pasir, yang kini diakui milik Australia, menjadi ‘pulau terdepan’ NKRI. Status Pulau Pasir di Laut Timor yang saat ini dikuasai Australia sebenarnya perlu diperdebatkan, dikaji dan diteliti ulang. Pemerintah Indonesia harus berjuang melalui jalur diplomasi tentang status pulau itu, karena sudah berabad-abad menjadi basis pencarian ikan bagi nelayan tradisional. Menurut pandangan nelayan di sana terdapat makam nelayan dan juga pulau itu termasuk jajahan Belanda (Kompas, 5 Januari 2006).

Apa yang dilakukan belakangan ini dengan membuat prasasti sebagai tanda bagian wilayah NKRI di “12 Pulau Terluar” dan kemudian dijaga ketat oleh anggota TNI bersenjata lengkap (Seputar Indonesia, 5 Juli 2010) memang merupakan langkah yang tepat. Akan tetapi sebenarnya itu baru merupakan penegasan. Yang lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan pulau-pulau

terutama untuk penduduk yang menjadi “penjaga” kedaulatan negara yang sesungguhnya. Merekalah sesungguhnya “orang-orang terdepan”<sup>4</sup> yang menjaga kedaulatan negara. Selain itu menjaga wilayah perairan tentu harus dengan memperkuat armada angkatan laut. Kalau hanya mengandalkan alutsista khususnya armada laut dapat digambarkan demikian. Malaysia dan Singapura memiliki 4 kapal selam, sementara RI hanya punya dua. Padahal perimbangan wilayah dua negara jiran itu, apalagi Singapura, sangat tidak sebanding. Idealnya Indonesia harus memiliki 12 kapal selam. Dasarnya adalah karena dengan adanya dua ALKI maka perairan laut di kepulauan Indonesia terbagi menjadi empat sektor. Masing-masing sektor laut itu memiliki tiga kapal selam.

Kenyataan lain, bahwa banyak masalah di laut yang harus ditangani terutama dengan globalisasi sehingga batas-batas wilayah negara menjadi sulit diatasi, apalagi di laut. Pencemaran di laut seperti yang baru-baru terjadi berupa tumpahan minyak di Laut Timor berakibat ke perairan Indonesia juga. Tumpahan minyak itu diduga dilakukan oleh perusahaan minyak PTTEP Australasia, asal Australia. Akibat kebocoran selama 74 hari sejak 21 Agustus 2009 telah mencemari wilayah perairan Indonesia dan berarti mematikan mata pencarian nelayan di

<sup>3</sup> Saya menggunakan ‘Pulau Terdepan’ untuk menggantikan “Pulau Terluar”. Sebutan “Pulau terduar” berdasarkan UNCLOS 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) dengan istilah “outermost island”. Lihat Susanto Zuhdi “Mengapa Bukan Pulau Terdepan?” Kompas, 8 September 2006.

<sup>4</sup> Dengan menggunakan istilah ‘Pulau Terdepan’ maka cocok dengan posisi penduduk yang berdiam di sana sebagai “orang-orang terdepan”. Sebab kalau kita sebut “pulau terluar maka apakah kita mau katakan mereka sebagai “orang-orang terluar”?

kabupaten Rote Ndao. Menurut angka yang diajukan Provinsi NTT atas kerugian itu Rp.860 Milyar (Kompas, 25 Juli 2010). Lebih jauh akibat pencemaran ini adalah kerugian baik langsung atau tidak langsung karena menjadi ancaman keberlanjutan sumber daya ikan di sekitar perairan Laut Timor (Kompas, Ibid). Dalam permasalahan seperti inilah peranan pemerintah melalui Kementerian kelautan dan Perikanan dituntut segera tanggap untuk membantu kerugian nelayan.

Menjadikan laut untuk kesejahteraan, tidak cukup dengan hanya meletakkan strategi agung “*The Blue Revolution*” dengan empat pilarnya, melainkan harus dengan program kegiatan dan tindakan nyata. Ditinjau dari perikanan saja maka sebanyak 3.4 juta orang mendapatkan nafkah sektor itu. Akan tetapi penanganan terhadap masalah-masalah seperti penggunaan pukat harimau (trawl), lisensi atau izin untuk nelayan asing, kemampuan pelabuhan untuk penangkapan ikan (termasuk pelabuhan tingkar luar) semuanya tampaknya masih berupa wacana kalau bukan disebut masih berupa rencana besar. Hal itu dapat disimak dari pernyataan resmi dalam program pengawasan dan pengelolaan penangkapan perikanan yang ditangani Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk, “mengoptimalkan potensi ZEE, yaitu memprioritaskan pelabuhan-pelabuhan penangkapan ikan dengan infrastruktur sehingga dapat dijadikan pelabuhan penangkapan ikan yang terintegrasi dan pelabuhan penangkapan ikan baru di area lingkaran luar. Dengan demikian diharapkan dapat

meningkatkan fungsi lelang ikan, unit penanganan dan prosesing ikan, quality control; pelabuhan penangkapan ikan diharapkan dapat menyediakan fasilitas counseling, data informasi, pengawasan keamanan laut”.<sup>5</sup>

Sengaja kata “diharapkan” ditekankan karena untuk menunjukkan bahwa pernyataan itu baru suatu kehendak atau kalau tidak mau dikatakan baru sebatas wacana. Kenyataannya yang kita dengar adalah betapa kerugian yang sering terjadi tentang berbagai kegiatan nelayan asing yang beroperasi secara tidak syah (illegal fishing).

### **Penutup**

Tidak mudah untuk menjawab dua pertanyaan di atas apalagi untuk mengatasi problematiknya. Untuk menjawab yang pertama, meskipun dengan proses panjang, adalah melalui pendidikan. Sungguh ironis apabila tidak diberikan pelajaran sejarah maritim kepada siswa di negeri dengan luas laut lebih besar daripada daratannya. Meskipun tidak perlu dibuat tersendiri, pada dasarnya materi sejarah maritim, dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada selain sejarah, yakni geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Perlu dicatat bahwa pembelajaran sejarah tidak diartikan konvensional: dengan hanya menghafal tahun dan peristiwa, melainkan memahami problematik yang dihadapi bangsa bahari dalam perspektif sejarah guna memperoleh manfaat. Inspirasi sejarah diharapkan mampu

---

<sup>5</sup> Tabloid Diplomasi: Media Komunikasi dan Interaksi, Kementerian Luar Negeri RI, No. 31 Tahun m:15 Mei-14 Juni 2010:14).

menggerakkan anak bangsa mengkaji berbagai aspek mengenai kelautan sesuai dengan disiplin ilmu seperti ekonomi, sains teknologi dan sosial budaya. Berbagai bentuk dan jenis kegiatan mencintai laut di luar kelas dapat dilakukan, seperti a.l., dengan AJARI (Depbudpar sejak 2006), Kapal Kebangsaan (Depdiknas: beberapa tahun lebih dahulu).

Untuk menjawab pertanyaan kedua, yakni agar laut dapat menjadi pemersatu bangsa diperlukan pemecahan alternatif. Suatu aspek yang tidak banyak ditakukan hingga saat ini, hemat saya adalah memberdayakan suku bangsa bahari (suku Bajo, suku laut) dan masyarakat nelayan agar dapat memanfaatkan sumber daya laut, bukan saja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka karena sebagian besar kondisinya miskin tetapi juga untuk memperkuat perekonomian negara. Pemberdayaan itu terutama ditujukan kepada penduduk pulau kecil terutama “pulau pulau terdepan”. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas dan perlengkapan sehingga nelayan mampu menggali berbagai kekayaan sumber daya di laut sehingga dapat hidup sejahtera. Dalam kondisi seperti itu rasa nasionalisme akan terus meningkat.

Ketika ancaman dari luar di masa datang tidak lagi berupa militer, maka kemampuan nir-militer yang pada hakikatnya dimiliki penduduk terutama di “pulau terdepan”, sungguh akan menjadi tumpuan bagi pertahanan kedaulatan di wilayah perbatasan laut. Peran sukubangsa dan masyarakat maritim harus diberdayakan karena

sesungguhnya merekalah yang merajut simpul-simpul perekat kepulauan yang juga berarti merekat keindonesiaan \*\*\*\*\*

#### ACUAN

- Lopian, A.B. “Sejarah Nusantara Sejarah Bahari”. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak tetap pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, (tidak terbit) 1992.
- Leur, J.C. van dan F.R.J. Verhoeven, Teori Mahan dan Sejarah kepulauan Indonesia. (terjemahan Kartini Abubakar) Jakarta: Bhratara, 1974.
- Niemejer, Hendrik E., A Sea of Histories, a History of the Seas: an interview with A.B. Lopian, dalam Itenerario, volume xxviii (2004) number 1, Leiden, Grafaria 2004: 7-15.
- Singgih Tri Sulistyono, The Java Sea Network: patterns in the Development of Interregional Shipping and Trade in the Process of national Economic Integration in Indonesia, 1870s-1970s. Profeschrift Doktor Universiteit Leiden, leiden 2003.
- Warren, James F. Iranun and Balangingi Globalization, Maritime Raiding and the Birth of Ethnicity. Singapore: Singapore University Press, 2002.
- Zuhdi, Susanto dan Didik Pradjoko, “Laut Sawu Sebagai Faktor Integratif”, makalah disampaikan dalam Diskusi Nasional “Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah: Potensi Sosial Budaya Laut Sawu Untuk Pengembangan Pulau-pulau Sekitarnya”, Departemen

Kebudayaan dan Pariwisata,  
Kupang 2004.